



Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani

Indah Meliana Handayani*

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Indonesia

Submitted : 29 November 2020 Revision : 02 Februari 2021 Accepted : 19 Juli 2021

Abstrak

Sengketa perbatasan wilayah Kalapani menjadi hambatan tersendiri bagi hubungan India dan Nepal. Sengketa ini berjalan sangat sengit dan panjang. Sejak 1814, Perang Anglo-Nepal telah dimulai dan berakhir pada 1816 dengan penandatanganan perjanjian Sugauli. Perjanjian ini berisi bahwa Sungai Kali sebagai penentu perbatasan. Namun, kedua negara masih memiliki interpretasi yang berbeda mengenai perjanjian tersebut serta membenarkan bukti-bukti yang mereka miliki hingga saat ini. Hal ini tentunya sangat mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut terutama pada bidang ekonomi dan keamanan lintas batas. Di sisi lain, keberadaan Tiongkok juga berpengaruh dalam perdebatan ini. Pasalnya, Tiongkok dan India merupakan dua kekuatan besar yang ada di Asia. Maka, jika India dan Nepal gagal untuk mencapai resolusi terkait dengan masalah ini, hal tersebut bisa memberikan peluang bagi Tiongkok seiring dengan aktivitasnya yang semakin agresif. Sehingga, Tiongkok dapat memperkeruh hubungan antara India dan Nepal. Ini jelas membuktikan bahwa terdapat banyak hambatan baik internal maupun eksternal dalam penyelesaian konflik perbatasan Kalapani. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta analisis konsep dari teori realisme.

Kata Kunci: Sengketa Kalapani, Perbatasan, Bilateral, Tiongkok

Abstract

The Kalapani border dispute has become an obstacle to relations between India and Nepal. This dispute was very complicated and long. Since 1814, the Anglo-Nepal War had started and ended in 1816 with the signing of the Sugauli treaty. This agreement states that the Kali river as determinant of the border. However, the two countries still have different interpretations of the agreement and confirm the evidences they have even until now. This is of course very disruptive to bilateral relations between the two countries, especially in the economic and cross-border security sectors. On the other hand, the presence of China is also influential in this dispute. Because of China and India are the two major powers in Asia. Therefore, if India and Nepal fail to reach a resolution on this issue, it could provide opportunities for China as its activities become more aggressive. Thus, China can cloud the relationship between India and Nepal. This clearly proves that there are many internal and external obstacles in resolving the Kalapani border conflict. This study uses qualitative methods using secondary data and conceptual analysis of realism theory.

Password: Kalapani Dispute, Border, Bilateral, China

How to Cite: Handayani, I. M. (2021). Hambatan dalam penyelesaian sengketa Perbatasan India dan Nepal di Wilayah Kalapani. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13 (2): 1-15.

*Corresponding author:

E-mail: Indahmeliana.handayani18@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Batasan negara merupakan perwujudan dari identitas suatu negara. Perjanjian dalam menentukan perbatasan merupakan langkah utama diakuinya perbatasan, tetapi sifatnya pun sangat terbatas. Banyak dari perbatasan internasional yang tidak terlihat jelas di lapangan. Bahkan banyak pula yang telah dibatasi, tetapi pemeliharannya tidak maksimal dari rezim yang bersangkutan. Setiap negara pasti memiliki banyak arsip terkait dengan batas negaranya dengan negara lain. Namun, bukan berarti banyaknya arsip tersebut memudahkan penentuan batas yang sebenarnya. Itulah konflik yang banyak terjadi di berbagai negara, salah satu di antaranya yaitu konflik India dan Nepal terkait dengan Kalapani.

Nepal merupakan negara yang diapit oleh dua negara besar di Asia yaitu India di bagian selatan, timur, dan barat. Kemudian, Tiongkok di bagian utara. Sebelumnya, Nepal dan *East India Company* sebagai penguasa India saat itu berseteru terkait dengan perbatasan. Pada akhirnya, perwakilan

dari Nepal terpaksa menandatangani perjanjian Sugauli pada tahun 1816. Karena merasa tidak puas dengan perjanjian tersebut, maka bukan raja maupun perdana menteri Nepal yang menandatangani perjanjian tersebut secara langsung, melainkan hanya seorang perwakilannya saja. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa "Sungai Kali" akan menandai perbatasan barat Nepal.



Gambar 1 : Peta Sengketa Perbatasan di Wilayah Kalapani.

Sumber : <https://www.bbc.com/news/world-asia-52967452>

Hingga saat ini, kunci dari ketidaksepakatan perbatasan Kalapani yakni asal muasal dari Sungai Kali. Ada berbagai macam pandangan dan sumber terkait dengan sungai ini. Seperti yang dinyatakan oleh Buddhi Narayan Shrestha sebagai mantan Direktur Jenderal departemen Survei

Tanah Nepal, telah mengklasifikasikan disebut "Sarjoo" atau "Gogra" justru perdebatan ini menjadi dua kelompok. menambah kebingungan terhadap Kelompok pertama yakni para tempat tersebut. cendekiawan dan peneliti beserta Pada Agustus 2019, pemerintah pemerintah. Mereka berpendapat India mencabut Pasal 370 dan 35A bahwa sungai yang mengalir di sebelah yang terdapat dalam Konstitusi India. barat Kalapani adalah Sungai Kali Dalam hal ini, telah memberikan status utama, yang berasal dari khusus kepada Negara bagian Jammu Limpiyadhura atau celah Lipulekh di dan Kashmir. Pemerintah membagi dekatnya, yang keduanya berada di dua negara bagian, akibatnya dalam wilayah Nepal. Sehingga membutuhkan peta baru secepatnya. membenarkan daerah tersebut sebagai Peta yang sama tersebut juga bagian dari Nepal. Kelompok kedua menunjukkan bahwa wilayah Kalapani terdiri dari Kelompok Kerja Batas yang disengketakan di Himalaya Bersama Tingkat Teknis Nepal-India berada di dalam perbatasan India dan pejabat dari Kedutaan Besar India (Mustafa, 2019). Nepal segera di Nepal (Shrestha, 2003). Pihak mengeluarkan keberatan atas peta tersebut berpendapat bahwa Sungai tersebut. Karena peta tersebut Kali berasal dari anak sungai yang mengidentifikasi wilayah itu sebagai lebih kecil bernama Pankhagad, wilayah yang tidak stabil di distrik terletak di bagian selatan Kalapani, dan Darchula di provinsi Sudurpashchim bukit selanjutnya yang berada di (Ranjan, 2019). Sebagai tanggapan, bagian timur ini merupakan perbatasan India telah menyatakan bahwa peta yang sebenarnya. Hal ini menjadikan tersebut "akurat". Munculnya peta baru wilayah itu bagian dari India (Baral, tersebut menimbulkan sengketa 2018). Hingga saat ini, Sungai Kali perbatasan yang belum terselesaikan memang belum memiliki batasan yang antara kedua negara. Ketidaksepakatan jelas. Selain itu, meskipun dikenal ini melibatkan tidak hanya Kalapani, sebagai "Kali" di hulu, bagian tengah tetapi juga area seperti Lipulekh, disebut "Mahakali" dan bagian bawah Limpiyadhura, dan Susta.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat “Kata” dibandingkan dengan “Angka” lebih jauh seberapa kompleks (Puskapol, 2014). Penelitian ini hambatan yang dihadapi oleh India didukung oleh data-data yang dan Nepal untuk menyelesaikan memberikan fakta sosial maupun sengketa perbatasan Kalapani. Maka politik serta dihasilkan dari beberapa dari itu, muncul pertanyaan yakni konsep. Data yang diciptakan dari sejauh mana hambatan yang muncul metode penelitian ini juga membantu baik internal maupun eksternal dalam untuk menunjukkan fakta yang tidak konflik tersebut? Penelitian ini juga tetap serta dapat memberikan menggunakan konsep-konsep dari pemahaman baru untuk teori realisme yakni *national interest*, mengembangkan penelitian. Selain itu, *security dilemma*, dan *balance of power* penelitian kualitatif memiliki tujuan yang lebih memungkinkan untuk bagaimana memahami suatu keadaan menganalisis konflik tersebut. Sebab, yang dapat berpengaruh pada perilaku masalah ini sejak dulu sangat sulit pembaca maupun penulis (Hancock, diselesaikan. Sementara itu, negara- 2002). Pola yang digunakan dalam negara yang terlibat adalah negara penelitian kualitatif ini menggunakan yang bertetangga. Sehingga, konflik pola deduktif. Pola deduktif ini tersebut sangat berpengaruh pada menggambarkan keseluruhan masalah stabilitas kawasan. yang terjadi secara umum, setelah itu dapat ditarik kesimpulan secara khusus. Pola deduktif ini dipilih karena akan mempermudah dalam memahami penelitian ini dengan teknik umum-khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menjelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal dalam perseteruan yang terjadi antara Nepal dan India terkait dengan klaim Kalapani. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, lebih menekankan pada Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara menentukan keadaan maupun gejala yang dapat menimbulkan gejala baru. Teknik

pengumpulan data yang digunakan “Kata” dibandingkan dengan “Angka” yakni melalui studi literatur yang (Puskapol, 2014). Penelitian ini termasuk sumber sekunder dalam didukung oleh data-data yang teknik pengumpulan data tersebut. memberikan fakta sosial maupun Teknik ini dilaksanakan melalui politik serta dihasilkan dari beberapa pencarian data dari berbagai literatur konsep. Data yang diciptakan dari yang memiliki keterkaitan dengan metode penelitian ini juga membantu masalah yang akan dibahas serta dapat untuk menunjukkan fakta yang tidak dianalisa oleh penulis. Literatur yang tetap serta dapat memberikan digunakan berupa jurnal, dokumen, pemahaman baru untuk buku, dan surat kabar yang mengembangkan penelitian. Selain itu, berhubungan dengan topik yang penelitian kualitatif memiliki tujuan diteliti. Tentunya sumber dan data bagaimana memahami suatu keadaan tersebut sangat penting dan tidak yang dapat berpengaruh pada perilaku dapat dipisahkan dalam penelitian. pembaca maupun penulis (Hancock, Maka, metode tersebut memang yang 2002). Pola yang digunakan dalam paling memungkinkan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian ini. Karena lebih mudah pola deduktif. Pola deduktif ini diakses sumber maupun datanya. menggambarkan keseluruhan masalah yang terjadi secara umum, setelah itu dapat ditarik kesimpulan secara khusus. Pola deduktif ini dipilih karena akan mempermudah dalam memahami penelitian ini dengan teknik umum-khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menjelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal dalam perseteruan yang terjadi antara Nepal dan India terkait dengan klaim Kalapani. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, lebih menekankan pada Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara menentukan keadaan maupun gejala yang dapat

menimbulkan gejala baru. Teknik konektivitas sosial dan perdagangan pengumpulan data yang digunakan yang lebih baik antara kedua negara, yakni melalui studi literatur yang meskipun terdapat pos pemeriksaan termasuk sumber sekunder dalam perbatasan serta penempatan pasukan teknik pengumpulan data tersebut. keamanan di perbatasan (Kansakar, Teknik ini dilaksanakan melalui 2012). Bagi India dan Nepal, pencarian data dari berbagai literatur perbatasan yang terbuka ini sering yang memiliki keterkaitan dengan dilukiskan sebagai "batu loncatan masalah yang akan dibahas serta dapat peluang" demi kepentingan kedua dianalisa oleh penulis. Literatur yang negara (Kumar, 2016).

digunakan berupa jurnal, dokumen, Dengan adanya perbatasan buku, dan surat kabar yang terbuka, diperoleh analisis yang berhubungan dengan topik yang membuat hubungan kedua negara diteliti. Tentunya sumber dan data menjadi khusus. Pun hal ini didukung tersebut sangat penting dan tidak oleh Joseph Carens seorang ahli teori dapat dipisahkan dalam penelitian. liberal menyatakan bahwa perbatasan Maka, metode tersebut memang yang terbuka yang dijalankan oleh kedua paling memungkinkan dalam negara akan membuat lingkungan penelitian ini. Karena lebih mudah menjadi kondusif dan bermanfaat diakses sumber maupun datanya. khususnya bagi masyarakat yang

Hubungan Kerja Sama India dan Nepal tinggal di daerah perbatasan kedua negara tersebut. Kendati demikian, hal ini menjadi sebuah dilema ketika perbatasan terbuka tersebut akan menimbulkan ancaman baru terhadap politik maupun komunitas teritorial liberal dari entitas non-negara seperti teroris, penipuan, perdagangan manusia, dan bentuk kejahatan lainnya (Bauder, 2015).

Perjanjian Perdamaian dan ini menjadi sebuah dilema ketika Persahabatan tahun 1950 perbatasan terbuka tersebut akan ditandatangani oleh India dan Nepal, menimbulkan ancaman baru terhadap menciptakan "Perbatasan Terbuka" politik maupun komunitas teritorial yang demikian diartikan dengan liberal dari entitas non-negara seperti adanya pergerakan orang yang bebas teroris, penipuan, perdagangan dan tidak dibatasi dari kedua sisi. manusia, dan bentuk kejahatan lainnya Pergerakan melewati demarkasi fisik (Bauder, 2015). relatif mudah yang mengarah pada

Upaya Penyelesaian Sengketa Kalapani

Setelah kedua negara menciptakan peta baru sebagai klaim atas kepemilikan wilayah tersebut, berbagai upaya juga telah dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan Nepal dan India di wilayah Kalapani. Nepal-India *Joint Technical Level Boundary Committee (JTBC)* beroperasi selama sekitar 26 tahun

Keterlibatan India dalam Politik Domestik Nepal

India memiliki keterlibatan yang cukup besar terhadap politik domestik Nepal sejak menganut sistem monarki hingga pada akhirnya bertransformasi menjadi sistem demokrasi multi-partai. India memainkan peran utama dalam penghapusan Dinasti Rana yang berusia 104 tahun di Nepal pada tahun 1951, kelanjutan dari kekuasaan monarki tanpa partai selama 30 tahun, dan pemulihan demokrasi multipartai pada tahun 1990. Penting untuk memahami bahwa krisis politik Nepal yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh konteks sejarah peran India dalam politik Nepal. Jadi, bukan hanya sebagai fenomena yang dipelihara di

dalam negeri oleh faktor-faktor politik, tidak memuaskan, sehingga membuat sosial, maupun ekonomi, tetapi juga India murka dengan memberlakukan terdapat intervensi yang dilakukan embargo ekonomi terhadap Nepal. oleh India untuk menyebarluaskan Dalam hal ini, India mengalami pengaruhnya di Nepal. *Security Dilemma* dengan Nepal atas

Pada tahun 1989, krisis nyata pembelian senjata dari Tiongkok. bagi rezim pun muncul ketika India Konsep *Security Dilemma* merupakan memberlakukan embargo ekonomi salah satu premis dalam teori realisme. terhadap Nepal setelah kedua negara Konsep ini menjelaskan bahwa hal gagal mencapai kesepakatan tentang tersebut bisa menimbulkan konflik pembaruan perjanjian perdagangan yang dipicu oleh rasa tidak aman dan transit. India menutup 19 dari 21 terhadap negara sekitarnya yang rute perdagangan dan juga 13 dari 15 ditandai dengan peningkatan rute transit melalui India yang keamanan sehingga menjadi ancaman digunakan oleh Nepal. Hal ini keamanan negara lain (O. Kanji, 2003). berdampak buruk pada kehidupan Maka, unsur penting dalam *security* sehari-hari masyarakat Nepal. *dilemma* yakni peningkatan Penyebab utama dari embargo tersebut kemampuan militer dalam bentuk adalah langkah Nepal yang tampaknya peningkatan anggaran militer, keras untuk menjauhkan diri dari persenjataan, dan keterlibatan dalam pengaruh India. Nepal membeli senjata konflik internasional yang secara jelas yang dikirim langsung melalui darat menunjukkan kapabilitas negara di dari Tiongkok. India berargumen bidang militer. India terlihat jelas bahwa Nepal seharusnya berkonsultasi mengalami *security dilemma* yang mana dengan India terlebih dahulu Tiongkok memiliki kekuatan yang berdasarkan perjanjian 1950. Namun, besar sebagai rivalnya serta Nepal Nepal bersikeras bahwa ketentuan berusaha meningkatkan kemampuan perjanjian itu tidak memerlukan militernya dalam persenjataan. Maka, konsultasi apapun kecuali impor India membalasnya dengan embargo senjata dilakukan dalam perjalanan ekonomi terhadap Nepal. melalui India. Tanggapan ini sangat

Partai politik di Nepal dengan memberikan demokrasi kepada Nepal, gencar melaksanakan gerakan massa India akan mendukung orang-orang untuk menentang sistem Panchayat Nepal tentang masalah demokrasi dan monarki, menyalahkan “embargo hak asasi manusia (Mishra, 2004). ekonomi” dan kesulitan yang Namun sekali lagi, komitmen India diakibatkannya pada warga negara terhadap demokrasi Nepal tampaknya karena kesalahan kebijakan merupakan cadar idealis yang pemerintah. Tentunya gerakan ini dimaksudkan untuk menutupi tujuan sangat didukung oleh India sebagai sebenarnya, yang difokuskan untuk balasan atas tanggapan yang tidak mengamankan kesepakatan penting memuaskan dari Nepal saat itu. lainnya dengan Nepal. Bahkan setelah Padahal sebelumnya, India sangat pemulihan demokrasi multipartai di mendukung sistem monarki karena Nepal, sikap India terhadap dinilai kondusif untuk mendukung tetangganya di Nepal tetap sama sekali India. Namun setelah adanya tidak berubah dan masih terus pertentangan, maka India dengan mengukir jalur politik Nepal seperti senang hati menawarkan beberapa yang dicontohkan oleh kasus bentuk dukungan yakni 207 anggota kontemporer pemberontakan Maois.

Parlemen India mengimbau **Hubungan Partai Komunis Nepal dan Pemerintah India untuk membantu India**

pemulihan demokrasi di Nepal serta Sejak tahun 1996, ketika Partai dana Nepal semua partai dibentuk Komunis Nepal-Maois (CPN-Maois) untuk mendukung gerakan pro- melancarkan “Perang Rakyat” di demokrasi. Pada tanggal 5 Januari 1990 Nepal, ada kekhawatiran tersendiri di dalam pidatonya di konvensi partai lembaga keamanan India tentang oposisi di Kathmandu, Chandra hubungan subversif antara CPN Maois Shekhar seorang pemimpin senior dan Naxalite India, yang secara resmi Janata Dal yang kemudian menjadi dikenal sebagai Partai Komunis India-perdana menteri India, menyatakan Maois (CPI-Maois). Keduanya memiliki bahwa sementara India tidak dapat tujuan yang sama yakni untuk

melawan “ekspansionisme India dan melangggang kekuasaan imperialisme AS”. Perdana Menteri Berkaitan dengan itu, persetujuan India, Dr. Manmohan Singh, kabinet Nepal atas peta baru dan memperingatkan bahwa hubungan imbauan PM Oli kepada warga untuk lintas batas Maois (India) merupakan merayakan masuknya wilayah ancaman yang sangat besar. Perdana sengketa hanya menyoroti Menteri kembali menekankan pada keputusannya untuk menyelamatkan tahun 2006 bahwa masalah Naxalite pemerintah. Sengketa perbatasan adalah “tantangan keamanan internal Kalapani membawa beban nasionalis terbesar” bagi negara. dan populis yang sangat besar.

Munculnya Retorika Anti-India

Muncul kecurigaan dari publik, permusuhan seseorang terhadap India, pers, dan politisi mengenai adanya semakin baik seorang nasionalis Nepal. hubungan antara India dan Maois Rasa oposisi nasionalisme ini juga dalam sengketa perbatasan Kalapani tercermin dalam pers Nepal. Persis yang menjadi pusat perhatian nasional seperti pers arus utama India yang pada 1998. Sentimen kebangsaan Nepal hanya melaporkan keprihatinan India digunakan sebagai modal politik oleh terhadap Nepal, sementara pers arus beberapa partai politik, tetapi tidak utama Nepal berfokus pada oleh Maois. Hingga saat itu, kaum keprihatinan Nepal terhadap India. Maois justru secara mencolok absent Sikap anti-India di antara para dari keseluruhan hikayat. Ini pemimpin Nepal bahkan lebih memunculkan kecurigaan bahwa mengkhawatirkan. Mereka mencoba kepemimpinan Maois telah berlindung untuk mendapatkan dukungan dengan di India serta tidak dalam posisi untuk secara terang-terangan menarik terlibat dalam aktivitas anti-India. sentimen anti-India di publik.

Selama beberapa dekade, **Gejolak Politik Domestik Nepal** terutama sejak rezim Raja Mahendra, Penting untuk diingat bahwa retorika anti-India telah menjadi alat NCP (*Nepal Communist Party*) didirikan politik bagi para elit Nepal untuk hanya beberapa tahun yang lalu memajukan karir politik dan melalui penggabungan dua aliran

utama gerakan komunis di negara ini yakni aliran yang bersekutu dengan kaum liberal untuk menggulingkan monarki dan mengantarkan demokrasi multi-partai di Nepal yaitu Partai Komunis Nepal-Bersatu Marxis Leninis (NCP/UML) dan lainnya yang telah melancarkan pemberontakan bersenjata melawan aliansi demokratis yaitu Partai Komunis Nepal-Pusat Maois, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maois. Perselisihan partai antara dua faksi yaitu pertama dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini KP Sharma Oli (NCP/UML) dan yang lainnya dipimpin oleh Pushpa Kamal Dahal (juga dikenal sebagai Prachanda) dan Madhav Kumar Nepal, dari Partai Komunis Nepal (NCP/Maois) yang berkuasa menawarkan solusi yang lebih baik. Itu merupakan gambaran tentang krisis saat ini. Sharma Oli menghadapi oposisi yang kuat di dalam NCP. Karena kelompok Dahal-Nepal berusaha untuk menggulingkannya dari pemerintahan dan partai. Perdana Menteri Sharma Oli menghadapi tuduhan serius yakni manipulasi kekuatan politiknya, kinerja yang tidak baik, dan membawa peraturan untuk membubarkan partai politik Madheshi untuk menggabungkan mereka dengan NCP.

Retorika Anti-India Meningkat Saat Pandemi

Keadaan menjadi lebih parah ditandai dengan adanya COVID-19. Tidak ada upaya bersama dari masyarakat sipil termasuk serikat pekerja untuk membantu pekerja migran dalam perjalanan pulang mereka yang sangat berbahaya menuju Nepal. Ketika kelas menengah borjuis menutup mata terhadap hal ini, negara dengan mudah mengabaikan kesengsaraan buruh migran sebagai "kejahatan yang diperlukan" untuk menyelamatkan negara dari virus COVID-19. Media menyoroiti beberapa kasus positif yang tertular COVID-19 berasal dari para migran yang kembali dari India. Sehingga, pengawasan di perbatasan dilakukan sangat ketat. PM Oli berkomentar di Parlemen bahwa 85% kasus virus COVID-19 di Nepal berasal dari India. Beberapa rekaman beredar tentang beberapa orang Nepal yang menyelip ke desa mereka dengan melintasi perbatasan India melalui ladang hijau dan sungai tanpa

memberi tahu pihak berwenang. Lebih *power*". Pada dasarnya, manusia lanjut, narasi media global juga memiliki sifat dasar yang ingin menyebutkan tentang "Penyebar berkuasa. Teori realisme juga Super" terkait penyebaran COVID-19 menyampaikan bahwa kepentingan yang berasal dari luar menambah adalah sebuah kekuasaan. Sehingga, stigma dan ketakutan akan "orang bagaimana pun caranya untuk bisa asing yang kembali" di Nepal (Shrestha mendapatkan kepentingan nasional 2020). Stigma tersebut membuat yang berbeda sekalipun, bisa retorika anti-India semakin meningkat. menggunakan cara yang konfliktual Tentunya ini akan semakin atau bahkan bertentangan dari yang menghambat penyelesaian konflik semestinya.

perbatasan tersebut.

Kedua negara sama-sama

Dalam konflik perbatasan India dan memiliki kepentingan dalam sengketa Nepal terkait klaim Kalapani diartikan perbatasan Kalapani. Bagi Nepal bahwa kepentingan nasional dari wilayah ini penting, sebab sumber kedua negara tak dapat dipisahkan. daya alam yang melimpah dapat Dengan demikian, penjelasan tersebut membantu perekonomian Nepal yang didukung oleh salah satu tokoh realis mana sumber perekonomian Nepal ternama pada abad ke-20 yaitu yaitu agrikultur. Sedangkan, India juga Morgenthau (Sorensen, 2013). Hans tidak ingin kalah dalam Morgenthau dikenal sebagai "Bapak memperjuangkan kepentingan Pencetus" aliran realis ini melahirkan nasionalnya. Perbatasan tersebut karya yang luar biasa lewat bukunya memberikan banyak manfaat bagi yaitu *Politic Among Nations*. Dalam India dalam mempermudah akses ke buku ini, penekanan terhadap negara tetangganya. Selain itu, India kepentingan nasional merupakan hal juga memiliki kepentingan untuk yang sangat penting bagi negara. memperluas pengaruhnya di Nepal. Selanjutnya juga dikatakan bahwa Hingga saat ini, India mengintervensi kenyataan yang terjadi sekarang ini politik domestik Nepal serta merupakan persetujuan untuk menjadikan hubungan keduanya memperoleh kekuasaan "*Struggle of* maupun perjanjian yang telah

ditandatangani bersama semata-mata hanya sebagai alat politik untuk bisa memperluas kekuasaannya.

Hubungan Kerja Sama Nepal dan Tiongkok

Hubungan kedekatan antara Nepal dan Tiongkok semakin hari nampak erat. Nepal dan Tiongkok juga telah menandatangani perjanjian perbatasan setelah banyak perselisihan pada tanggal 21 Maret 1960. Ada masalah yang berkaitan dengan Gunung Everest yang akhirnya secara resmi diselesaikan ketika Perdana Menteri Tiongkok yang berkunjung saat itu Chou En-Lai menyatakan pada tahun 1960 bahwa Gunung Everest adalah milik Nepal (Shrestha, 2007). Selain itu, Nepal juga merupakan bagian integral dari *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok. Kondisi geografis Nepal yang terjebak dalam daratan atau jauh dari lautan, serta Nepal yang merasa dipermainkan India akibat sengketa Kalapani membuat Nepal menyepakati tawaran Tiongkok untuk menggunakan sebagian pelabuhan lautnya (Sahu, 2015).

India menduga bahwa selama ini Tiongkok telah memprovokasi Nepal untuk menentangnya. Pada 18 Mei 2020, kabinet Nepal menyetujui peta politik baru yang mengklaim kedaulatannya di atas jalur seluas 335 km persegi yang mencakup Kalapani, Limpiyadhura, dan Lipu Lek. Masalah ini diangkat oleh beberapa media setelah Panglima Angkatan Darat India mengisyaratkan kemungkinan terdapat keterlibatan Tiongkok. Tiongkok pun telah menyebarkan propaganda anti-India lewat stasiun radio FM lokal *China Radio International* di Kathmandu dan *Nepal-China Mutual Cooperation Society (NCMCS)*, yang didanai oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal (Ranade, 2010).

Keterlibatan Tiongkok di Nepal selain fokus pada ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keamanan yang berdasarkan pada konsep *Balance of Power*. Menurut Kenneth Waltz ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tindakan suatu negara untuk melakukan *balancing* yaitu kedekatan geografis (*proximity*), kekuatan ofensif, intensi ofensif, dan kekuatan agregat yakni menandai bahwa semakin kuat

dan meningkat sumber daya yang seberapa kompleks hambatan yang dimiliki oleh suatu negara, maka itu dihadapi India dan Nepal untuk akan menjadi sebuah ancaman bagi menyelesaikan sengketa perbatasan negara lain (Walt S. 1985). Tiongkok Kalapani. Berdasarkan perspektif melakukan *balance of power* dengan realisme, kepentingan nasional Nepal dipengaruhi atas kedekatan merupakan hal yang harus geografis. Negara yang lebih dekat diperjuangkan. Negara ingin terus akan menjadi ancaman terbesar. Selain berkuasa dengan mencari kekuatan itu, kekuatan India yang semakin kuat sebesar-besarnya. Faktor internal yang juga merupakan alasan Tiongkok dimainkan oleh para penguasa di melakukan kerja sama dengan Nepal Nepal mencerminkan sikap yang yang termasuk ke dalam faktor sangat buruk dengan meningkatkan *aggregate power*. Sehingga, negara akan retorika anti-India dan juga melakukan *balance of power* dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh membentuk aliansi untuk menciptakan kelompok Maois. Kemudian, faktor *sphere of influence* (Lestari, 2009). eksternal dilihat dari kepentingan India Tiongkok juga mulai menjalani misinya mengintervensi dan melakukan dengan menjalin kerja sama dengan ekspansi di Nepal tidak dapat Pakistan yang juga memiliki konflik dihindarkan sejak Nepal masih dengan India. Di sini terlihat bahwa menganut sistem monarki sampai Tiongkok memiliki keinginan untuk demokrasi. Kehadiran Tiongkok juga menjadi hegemon di kawasan tersebut. tidak kalah penting pengaruhnya Maka, hambatan yang dialami India terhadap ketegangan kedua negara dan Nepal untuk menyelesaikan tersebut. Maka, seharusnya India dan konflik perbatasan kian pelik. Nepal bisa melakukan perundingan Ketegangan geopolitik di kawasan dan berkomitmen untuk menjaga tersebut juga semakin meningkat. hubungan kedua negara atas dasar saling membutuhkan serta kesamaan budaya yang telah melekat di antara keduanya sejak dulu. Pilihan lainnya yakni kedua negara sepakat membawa

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian di atas, dapat dilihat

konflik ini ke *International Court of Justice* (ICJ). Sikap Nepal harus bijak dan netral agar masalah ini tidak mengganggu stabilitas kawasan Asia Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahadur Ayadi, Arjun. (2018). Dilemma and Factionalism in the Maoist Politics of Nepal. *Journal of Political Science* Vol.18
- Cowan, Sam. (2015). *Resolution to The Disputed Territory Along Nepal's Northern Boundary*. Diunduh di <http://recordNepal.com/wire/Indian-checkposts-lipu-lekh-and-kalapani>
- Dhungel, D. Jagat, B. & Narendra, K. (2020). North-Western Boundary of Nepal. *Journal of International Affairs* Vol. 3:1-41, Doi: <https://doi.org/10.3126/joia.v3i1.29077>
- Kumar Sahu, Arun. (2015). Future of India Nepal Relations: Is China a Factor? *Strategic Analysis*, 39(2): 197-204, DOI: 10.1080/09700161.2014.1000670
- Manish, Dabhade. & Harsh V. Pant. (2004). Coping with Challenges to Sovereignty: Sino Indian Rivalry and Nepal's Foreign Policy. *Contemporary South Asia*, 13(2):157-169,
- Mishra, Rabindra. (2004). India's Role in Nepal's Maoist Insurgency. *Asian Survey*, Vol. 44(5): 627-646
- Mustafa, Faizan. (2019). *On dilution, bifurcation and special status*. Diunduh di <https://www.thehindu.com/opinion/d/on-dilution-bifurcation-and-special-status/article-29291747.ece>.
- Nath Baral, Toya. (2018). Border Disputes and Its Impact on Bilateral Relation: A Case of Nepal-India International Border Management. *Journal of APF Command and Staff College*
- Nayak, Nihar. (2008). Maoists in Nepal and India: Tactical Alliances and Ideological Differences. *Strategic Analysis*, 32(3): 459-475,
- Nayak, Sohini. (2020). India and Nepal's Kalapani Border Dispute: An Explainer. *ORF Issue Brief No.356, April 2020, Observer Research Foundation*.
- Paudyal, Gyanendra. (2013). *Border Dispute Between Nepal and India*. *Tribhuvan University*.
- Ranade, Jayadeva. (2010). *China's Increasing Inroads Into Nepal*. *Centre for Air Power Studies*.
- Shakya, Mallika. (2020). *The Politics of Border and Nation in Nepal in The Time of Pandemic*. *SpringerNature*
- Sigdel, Anil. (2018). *China's Growing Footprint in Nepal: Challenges and Opportunities for India*. ORF ISSUE BRIEF No. 260. Observer Research Foundation.
- Walt, S. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4): 3-43. DOI:10.2307/2538540